

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bentuk upaya untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia (SDM) di Indonesia adalah melalui proses pendidikan (Bahri, 2022; Thoha, 2017). Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk manusia menjadi cerdas, memiliki keahlian, dan menjalani kehidupan yang lebih baik sehingga dapat berkontribusi positif dalam masyarakat dan mandiri secara individu (Harita et al., 2022; Sujana, 2019). Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk menyelenggarakan pendidikan yang merata dan berkualitas. Dalam pelaksanaannya, pemerintah berkolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat dan sektor swasta untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, pendidikan berkualitas menjadi tanggung jawab bersama dari semua elemen masyarakat.

Sekolah sebagai unit pendidikan resmi memerlukan pengelolaan yang efektif untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Dalam konteks ini, penerapan prinsip-prinsip manajemen modern sangat penting, karena prinsip-prinsip tersebut tidak hanya berlaku untuk lembaga bisnis, tetapi juga relevan dalam dunia pendidikan. Pengelolaan yang baik mencakup berbagai aspek, termasuk pengelolaan sumber daya manusia, yang melibatkan guru, staf, siswa, dan semua pihak yang terlibat dalam proses belajar mengajar. Selain itu, pengelolaan juga harus memperhatikan aspek pendanaan, bahan baku, peralatan, metode pengajaran, dan pasar atau konsumen pendidikan. Dengan

demikian, sekolah harus mampu mengintegrasikan semua elemen ini untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan efisien (Noor & Islamiya, 2023).

Objek pengelolaan meliputi: 1) *Man* (manusia), 2) *Money* (pendanaan/uang), 3) *Material* (bahan baku), 4) *Machine* (mesin/peralatan), 5) *Method* (cara), dan 6) *Market* (pasar/konsumen) (Kusyudiyanto, 2023). Sekolah sebagai unit pendidikan resmi memerlukan pengelolaan yang efektif untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Dalam konteks ini, penerapan prinsip-prinsip manajemen modern sangat penting, karena prinsip-prinsip tersebut tidak hanya berlaku untuk lembaga bisnis, tetapi juga relevan dalam dunia pendidikan. Pengelolaan yang baik mencakup berbagai aspek, termasuk pengelolaan sumber daya manusia, yang melibatkan guru, staf, siswa, dan semua pihak yang terlibat dalam proses belajar mengajar.

Objek pengelolaan dalam konteks ini meliputi: manusia (*man*), yang mencakup sumber daya manusia seperti guru, staf, siswa, dan semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan. Pendanaan atau uang (*money*), yang melibatkan pengelolaan keuangan, termasuk anggaran sekolah, pendanaan, serta penggunaan dana untuk operasional dan pengembangan sekolah; bahan baku (*material*), yang terdiri dari bahan-bahan yang diperlukan untuk proses pendidikan, seperti buku pelajaran, alat tulis, dan sumber belajar lainnya. Mesin atau peralatan (*machine*), yang mencakup peralatan dan teknologi yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar, seperti komputer, proyektor, dan alat laboratorium; cara atau metode (*method*), yang mencakup pendekatan yang

digunakan dalam proses pembelajaran dan pengajaran, termasuk kurikulum dan strategi pembelajaran. Pasar atau konsumen (*market*), yang melibatkan pihak-pihak yang dilayani oleh sekolah, termasuk siswa, orang tua, dan masyarakat luas sebagai konsumen jasa pendidikan.

Dengan mengelola keenam objek tersebut secara efektif, sekolah dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan (Kusyudiyanto, 2023). Semua elemen ini perlu diselaraskan agar sejalan dengan misi sekolah sebagai organisasi yang mencapai keuntungan atau memberikan manfaat secara non-keuntungan/ *profit*. Dari keenam elemen tersebut, aspek yang paling vital, baik dalam organisasi profit maupun pendidikan, adalah masalah keuangan atau pembiayaan (Nurkamiden & Anwar, 2023).

Dalam usaha meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, tidak hanya tergantung pada manajemen semata tetapi juga bergantung pada pembiayaan (Bisri, 2020; Latifah, 2022). Satuan Pendidikan akan mengalami kesulitan dalam menjalankan kegiatan pendidikannya jika tidak didukung oleh pembiayaan yang memadai. Pengelolaan keuangan di suatu lembaga pendidikan, atau yang lebih dikenal sebagai sekolah, melibatkan pengumpulan, pengelolaan, dan penggunaan dana, yang umumnya dikenal dengan istilah manajemen pembiayaan (Malida, 2024; Widodo et al., 2023). Manajemen pembiayaan pendidikan sebaiknya dilakukan secara terstruktur dan transparan. Transparansi dalam pengelolaan keuangan di bidang pendidikan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kepala sekolah sebagai manajemen

tertinggi dalam satuan pendidikan diharapkan mampu mengelola keuangan sekolah dengan baik (Isnaini et al., 2023; Julaiha, 2019).

Pembiayaan dalam pendidikan melibatkan segala kegiatan terkait dengan perolehan dan penggunaan dana untuk melaksanakan program-program pendidikan (Isnaini et al., 2023). Dana untuk pembiayaan pendidikan seharusnya berasal dari APBN, APBD, dan kontribusi orang tua atau wali siswa. Meskipun anggaran untuk kegiatan sekolah ditetapkan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, namun seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah penerima manfaat. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan warga sekolah, termasuk staf administrasi dan pendidik, dalam proses perencanaan anggaran. Kondisi setiap satuan pendidikan atau sekolah bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk lokasi geografis, tingkat pendidikan, kondisi politik, hukum, ekonomi, serta program anggaran pembiayaan dan administratif dari sekolah (Nurhalimah, 2019; Zohriah et al., 2023).

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengatur tentang kewajiban dan penyediaan dana untuk pendidikan. Berdasarkan UU No. 20 tahun 2003 bab XIII pasal 46 ayat 1 mengenai tanggung jawab pendanaan, disebutkan bahwa pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sumber pendanaan pendidikan ditetapkan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengarahkan sumber daya yang ada sesuai dengan aturan yang berlaku (Ginanjari & Purwanto, 2022; Hilmin et al., 2022).

Sumber dana dan pembiayaan bagi satuan pendidikan merupakan masalah utama dalam pengelolaan pendidikan, terutama bagi sekolah swasta. Ketidakmampuan suatu satuan pendidikan dalam menyediakan pembiayaan untuk operasionalnya dapat menghambat proses pembelajaran (Futaqi, 2020; Siregar et al., 2023). Meskipun mendapatkan bantuan dari pemerintah, seperti dana BOS, sekolah swasta masih membutuhkan dana tambahan untuk memenuhi kekurangan operasional. Oleh karena itu, sekolah swasta perlu berinovasi dalam mencari sumber pendanaan tambahan, seperti melalui Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Namun, fenomena ini sering dihadapi karena biaya operasional pendidikan di sekolah swasta jauh lebih tinggi dibandingkan dengan alokasi dana yang diterima dari pemerintah. Hal ini menunjukkan perlunya manajemen pembiayaan yang baik bagi sekolah swasta agar dapat beroperasi secara efektif.

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan suatu negara. Salah satu elemen kunci dalam meningkatkan kualitas pendidikan adalah manajemen pembiayaan, terutama dalam konteks kejuruan yaitu sekolah menengah kejuruan (SMK). SMK memiliki peran penting dalam mempersiapkan tenaga kerja untuk memasuki pasar kerja (Khirdany et al., 2021). Kenyataannya, di tahun 2023 justru SMK menyumbang jumlah terbesar pengangguran di SMK diatas 9,2% (Adel, 2022). Pengangguran terjadi karena mutu pendidikan yang masih rendah (Anwar & Putu Sudira, 2022). Rendahnya mutu pendidikan terjadi karena beberapa hal, terutama terkait mutu manajemen pembiayaan pendidikan (Waluyo et al., 2023).

Selama ini, model pembiayaan pendidikan di SMK sebagian besar masih bergantung pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang disediakan oleh pemerintah. Dana BOS digunakan untuk kebutuhan operasional sekolah, seperti gaji guru honorer, pemeliharaan fasilitas, dan pembelian bahan ajar (Suhartanta et al., 2024). Selain itu, beberapa SMK juga mengandalkan kerja sama dengan dunia industri melalui program magang, donasi alat praktik, serta pelatihan bagi siswa dan guru. Namun, keterlibatan industri dalam pembiayaan pendidikan masih belum terstruktur secara sistematis. Beberapa SMK yang memiliki hubungan erat dengan industri tertentu mendapatkan dukungan lebih besar dalam bentuk CSR atau sponsorship, sementara SMK lainnya masih mengalami kesulitan dalam menjalin kemitraan dengan dunia usaha (Kusyudiyanto, 2023).

Model pembiayaan yang diterapkan pada SMK belum terintegrasi dengan kebutuhan industri (Ezeh & Ogara, 2020). Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab dan otoritas SMK tanpa melibatkan dunia industri. Hal ini mengakibatkan kesenjangan antara keterampilan yang diajarkan di SMK dengan tuntutan pasar kerja yang terus berkembang (Lawitta et al., 2017). Sistem manajemen pembiayaan yang terpisah dari dunia industri sering kali gagal mengantisipasi perubahan teknologi dan kebutuhan pasar, sehingga menciptakan hambatan bagi lulusan SMK untuk mencapai kompetensi kesiapan kerja dan berdampak pada rendahnya mutu pendidikan. Selain itu, model pembiayaan yang belum terintegrasi dengan industri juga dapat menyebabkan ketidakseimbangan

dalam distribusi sumber daya dan kesempatan pendidikan (Nurkamiden & Anwar, 2023). Model pembiayaan pendidikan SMK yang tidak melibatkan industri cenderung mengalami keterbatasan dalam penyediaan fasilitas, peralatan, dan pelatihan untuk menawarkan program-program pendidikan yang berkualitas. Akibatnya, siswa di SMK terbatas mengakses peluang pendidikan yang sama dengan mereka yang berada di lembaga dengan pembiayaan yang lebih baik.

Ketidaktersediaan sumber daya yang memadai juga dapat berdampak negatif pada kualitas pengajaran dan pembelajaran di SMK. Guru dan instruktur diharapkan untuk mengajar keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan perkembangan industri, namun kurangnya akses terhadap pelatihan profesional dan peralatan yang modern dapat menghambat kemampuan mereka untuk memberikan pendidikan yang efektif. Dengan demikian, model pembiayaan yang tidak terintegrasi dengan baik dapat menjadi penghambat bagi peningkatan mutu pendidikan di SMK. Terakhir, keberlanjutan model pembiayaan yang terpisah dari industri juga memunculkan masalah jangka panjang terkait stabilitas dan perkembangan institusi pendidikan kejuruan. Tanpa keterlibatan aktif dari pihak industri dalam menyokong pendanaan dan mengarahkan kurikulum, risiko keterlambatan dalam menanggapi perubahan industri dan kebutuhan pasar kerja akan semakin meningkat (Ezeh & Ogara, 2020).

Permasalahan keuangan seringkali menjadi hambatan dalam pengelolaan SMK secara mandiri. Faktor-faktor seperti biaya operasional, pengembangan

kurikulum, pemeliharaan fasilitas, dan penggajian tenaga pendidik menjadi bagian dari tantangan utama yang harus diatasi melalui manajemen pembiayaan yang baik. Tantangan yang terkait dengan biaya operasional, pengembangan kurikulum, pemeliharaan fasilitas, dan penggajian tenaga pendidik merupakan fokus utama dalam manajemen pembiayaan yang efektif bagi SMK. Biaya operasional mencakup segala kebutuhan sehari-hari termasuk listrik, air, dan kebutuhan administratif lainnya yang membutuhkan alokasi anggaran yang tepat.

Hasil analisis kebutuhan yang dilaksanakan dengan metode wawancara dengan peserta dari guru SMK dan praktisi industri menunjukkan bahwa pembiayaan pendidikan di SMK masih menghadapi tantangan signifikan, terutama terkait keterbatasan dana. Sumber pembiayaan utama di SMK berasal dari pemerintah melalui dana BOS dan sumbangan masyarakat, namun jumlahnya sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan penting, seperti pembaruan fasilitas dan alat praktik yang sesuai dengan perkembangan teknologi industri. Akibatnya, infrastruktur dan peralatan yang digunakan oleh siswa dalam praktik tidak selalu sejalan dengan kebutuhan dunia industri saat ini, yang berdampak pada kualitas pendidikan vokasi.

Selain itu, hasil wawancara juga menyoroti pentingnya kolaborasi yang lebih erat antara SMK dan industri. Para guru dan praktisi industri sepakat bahwa keterlibatan industri dalam pembiayaan pendidikan di SMK masih terbatas, padahal dukungan yang lebih intensif dari pihak industri sangat diperlukan. Industri diharapkan tidak hanya memberikan bantuan dana, tetapi

juga berperan dalam pengembangan kurikulum, penyediaan pelatihan bagi guru, dan memperbarui alat praktik yang sesuai dengan standar industri terkini.

Adanya model pembiayaan pendidikan berbasis industri dianggap sebagai solusi yang dapat mengatasi berbagai tantangan ini. Dengan model ini, diharapkan industri dapat berkontribusi lebih besar, baik dalam hal dana maupun pelatihan bagi siswa dan guru. Model ini juga dipandang mampu membantu mengembangkan keterampilan siswa agar lebih sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga lulusan SMK dapat lebih mudah diserap oleh industri. Selain itu, dukungan industri diharapkan dapat membantu memperkuat kurikulum dan meningkatkan kualitas guru melalui program pelatihan yang relevan.

Rekomendasi yang dihasilkan dari wawancara mencakup peningkatan kemitraan yang sistematis antara SMK dan industri, yang tidak hanya mencakup kontribusi dana tetapi juga pelatihan yang terstruktur serta program magang bagi siswa. Selain itu, disarankan agar pemerintah memberikan insentif bagi industri yang berkontribusi dalam pembiayaan pendidikan di SMK, sehingga partisipasi industri dalam mendukung pendidikan vokasi dapat meningkat.

Secara keseluruhan, pembiayaan pendidikan berbasis industri dipandang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan vokasi di SMK. Dengan adanya dukungan dari industri, baik dalam hal dana maupun pengembangan kurikulum dan pelatihan, diharapkan siswa SMK akan memiliki keterampilan yang lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja,

sehingga meningkatkan kesiapan kerja lulusan dan memperbesar peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan

Melihat hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengembangan model manajemen pembiayaan di SMK, dengan judul **"Pengembangan Model Pembiayaan Pendidikan Berbasis Industri Untuk SMK"**.

B. Identifikasi Masalah

1. Ketergantungan pada sumber dana terbatas. Satuan pendidikan, terutama sekolah swasta, mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan operasionalnya karena terbatasnya sumber dana yang diperoleh dari pemerintah, seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
2. Biaya operasional pendidikan di sekolah swasta cenderung lebih tinggi daripada alokasi dana yang diterima, sehingga menyebabkan kekurangan dana yang signifikan.
3. Kurangnya ketersediaan dana tambahan. Meskipun mendapatkan bantuan dari pemerintah, sekolah swasta masih membutuhkan dana tambahan untuk mengatasi kekurangan operasional. Namun, sumber dana tambahan tersebut seringkali sulit diperoleh karena keterbatasan kemampuan finansial orang tua siswa atau masyarakat setempat.
4. Model manajemen pembiayaan pendidikan belum berbasis kebutuhan industri. Terdapat kesenjangan antara kebutuhan operasional sekolah

dengan kebutuhan-kebutuhan industri, yang disebabkan oleh kurangnya perencanaan dan pengelolaan keuangan yang efektif dan tepat.

5. Tidak transparannya sistem pendanaan. Keterbatasan transparansi dalam sistem pendanaan pendidikan menyebabkan kurangnya kepercayaan dari masyarakat terhadap pengelolaan keuangan di sekolah. Ketidakjelasan dalam penggunaan dana dapat menimbulkan keraguan dan ketidakpuasan dari *stakeholders*, seperti orang tua siswa dan masyarakat.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya, penelitian ini akan fokus pada pengembangan model pembiayaan pendidikan SMK dengan mengintegrasikan kebutuhan dunia industri.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana karakteristik model pembiayaan pendidikan berbasis industri untuk SMK?
2. Sejauhmana kualitas model pembiayaan pendidikan berbasis industri yang diterapkan di SMK?

E. Tujuan Penelitian:

1. Mengetahui karakteristik model pembiayaan pendidikan berbasis industri untuk SMK.

2. Mengetahui sejauhmana kualitas model pembiayaan pendidikan berbasis industri yang diterapkan di SMK.

F. Spesifikasi Produk Yang Dikembangkan

Produk ini dirancang untuk mengembangkan sistem yang berkelanjutan dalam mengelola pembiayaan pendidikan dengan fokus pada integrasi industri. Fitur utamanya mencakup fasilitasi kolaborasi antara SMK dan industri untuk merencanakan, mengorganisasi, mengawasi dan mengevaluasi proses pembiayaan pendidikan di SMK.

Prinsip manajemen pembiayaan pendidikan berbasis industri, terdiri dari tahapan perencanaan (planning), melibatkan pengidentifikasian kebutuhan finansial yang tepat untuk mendukung program-program pendidikan yang relevan dengan industri tertentu. Ini mencakup estimasi biaya untuk infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Pengorganisasian (organizing) melibatkan strukturasi sumber daya dan dukungan dari pihak industri, termasuk pembagian tugas dan tanggung jawab dalam mengelola sumber daya keuangan yang telah diperoleh, serta mengkoordinasikan upaya antara institusi pendidikan dan mitra industri untuk optimalisasi penggunaan dana. Pengarahan (actuating atau kepemimpinan) mencakup memastikan bahwa sumber daya finansial digunakan secara efektif dalam mendukung inisiatif-inisiatif pendidikan yang terintegrasi dengan kebutuhan industri, melalui pembuatan keputusan yang strategis dan dukungan penuh dari

kepemimpinan pendidikan dan industri. Pengawasan (controlling) melibatkan pemantauan secara terus-menerus terhadap pengeluaran dan hasil dari penggunaan dana, dengan melakukan evaluasi terhadap pencapaian tujuan pendidikan serta koreksi dan perbaikan dalam pengelolaan keuangan agar tetap sesuai dengan visi dan misi program pendidikan berbasis industri yang telah ditetapkan.

G. Manfaat Pengembangan

Pengembangan model pembiayaan pendidikan berbasis industri untuk SMK memiliki berbagai manfaat yang signifikan, antara lain:

Manfaat Teoritis:

1. Menyediakan landasan teoritis baru dalam pemahaman tentang bagaimana model pembiayaan pendidikan berbasis industri dapat diimplementasikan secara efektif di sekolah menengah kejuruan (SMK).
2. Mendorong pengembangan teori baru dalam bidang integrasi model pendidikan dengan kebutuhan industri, yang dapat diaplikasikan dalam konteks pendidikan teknis dan vokasional.
3. Mengusulkan perubahan signifikan dalam model pendanaan pendidikan, khususnya untuk SMK, yang dapat menjadi dasar untuk peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan.

Manfaat Praktis:

1. Menyediakan panduan praktis bagi lembaga pendidikan untuk mengembangkan model pembiayaan yang berkelanjutan, terutama yang

terintegrasi dengan kebutuhan industri lokal atau sektor tertentu seperti kendaraan listrik.

2. Meningkatkan akses terhadap pendidikan teknis dan vokasional berkualitas tinggi dengan mengurangi hambatan finansial bagi siswa yang ingin mengikuti program-program tersebut.
3. Memperkuat kemitraan antara industri dan lembaga pendidikan, yang dapat menghasilkan lulusan yang lebih siap kerja dan relevan dengan tuntutan pasar.

H. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan

1. Asumsi:

Model Pembiayaan Pendidikan Berbasis Industri (MPBI) diasumsikan memiliki potensi untuk mengatasi permasalahan dalam pembiayaan pendidikan di SMK. Hal ini mengimplikasikan bahwa pendekatan MPBI dapat menjadi solusi yang efektif untuk memperbaiki sistem pendanaan yang ada di SMK, dengan menawarkan model yang lebih terintegrasi dengan kebutuhan industri lokal.

2. Keterbatasan:

- a. Distribusi dana yang tidak merata antar wilayah dapat menyebabkan kesenjangan kualitas pendidikan yang signifikan di antara sekolah-sekolah. Ini berarti sekolah-sekolah di daerah terpencil mungkin kesulitan untuk mengakses sumber daya dan dukungan yang

diperlukan untuk membangun kemitraan yang efektif dengan industri lokal.

- b. Penggunaan dana yang tidak efisien dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dapat membuka celah untuk penyalahgunaan dana pendidikan. Hal ini tidak hanya mengurangi kualitas dari MPBI tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan.
- c. Keterbatasan anggaran berarti bahwa banyak sekolah mungkin tidak memiliki fasilitas atau sumber daya yang memadai untuk mendukung program pelatihan berbasis industri dengan baik. Hal ini dapat menghambat kemampuan sekolah untuk memberikan pendidikan yang relevan dan up-to-date sesuai dengan kebutuhan industri.
- d. Ketergantungan yang tinggi pada bantuan pemerintah tanpa mencari sumber dana alternatif dapat menghambat inisiatif sekolah dalam menjalin kemitraan yang berkelanjutan dengan sektor industri. Ketergantungan ini mungkin membatasi fleksibilitas sekolah dalam mengembangkan inovasi dan proyek kolaboratif yang membutuhkan pendanaan tambahan.
- e. Dana yang terbatas untuk pelatihan guru bisa berdampak pada kurangnya kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri yang terus berubah. Akibatnya, lulusan mungkin tidak sepenuhnya siap untuk menghadapi tuntutan dunia kerja yang dinamis, menyebabkan

kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki oleh lulusan dan yang dibutuhkan oleh pasar kerja.

Model Pembiayaan Pendidikan Berbasis Industri (MPBI) yang dikembangkan, diasumsikan memiliki potensi mengatasi permasalahan-permasalahan dalam pembiayaan pendidikan di SMK. Model pembiayaan pendidikan di Indonesia memiliki beberapa kelemahan signifikan terkait kemitraan dengan industri. Distribusi dana yang tidak merata menyebabkan kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah, menghambat kemampuan sekolah-sekolah di daerah terpencil untuk membangun kemitraan dengan industri. Penggunaan dana yang tidak efisien dan kurangnya transparansi membuka peluang penyalahgunaan, yang mengurangi kualitas pembiayaan pendidikan. Keterbatasan anggaran membuat banyak sekolah kekurangan fasilitas dan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung program pelatihan berbasis industri. Selain itu, ketergantungan tinggi pada bantuan pemerintah tanpa mencari sumber dana alternatif menghambat inisiatif sekolah dalam menjalin kemitraan dengan sektor industri. Dana yang terbatas untuk pelatihan guru juga menyebabkan kurangnya kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga lulusan tidak selalu siap menghadapi dunia kerja, mengakibatkan kesenjangan keterampilan dengan kebutuhan pasar kerja.